

BAB III

DINAMIKA POLITIK ASEAN DALAM KONFLIK REGIONAL

Pada bab III ini akan dibahas mengenai sejarah dari awal terbentuknya organisasi *international governmental organisation* di regional Asia Tenggara bernama ASEAN. Selain itu akan dibahas juga dinamika politik ASEAN dalam mengatasi konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya dengan menggunakan ASEAN Way. Tiga konflik yang akan dibahas diantaranya sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina, sengketa kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Myanmar, dan Intervensi ASEAN saat krisis Topan Nargis di Myanmar.

A. Sejarah ASEAN

Association of Southeast Asian Nations atau biasa disingkat dengan ASEAN merupakan *intergovernmental international organization*. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dicetus oleh lima negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Gambar 3. 1 Lambang ASEAN



Sumber: asean.org (diakses pada 20 Februari 2018)

Lahirnya organisasi regional ini dimotivasi oleh adanya kesamaan nasib dari seluruh negara pendiri ASEAN. Seluruh negara anggota pendiri ASEAN kecuali Thailand baru mendapatkan kemerdekaannya setelah berabad-abad merasakan penjajahan. Indonesia merasakan dampak penjajahan kolonial Belanda selama sekitar 350 tahun, Malaysia dan Singapura dijajah oleh Britania Raya dari abad ke-18 hingga abad ke-20, sementara Filipina merupakan wilayah koloni dari Kerajaan Spanyol selama 265 tahun (1569-1821). Menurut Rodolfo Severino Jr yang merupakan Sekretaris Jenderal ASEAN tahun 1998 sampai 2002 mengungkapkan bahwa pembentukan ASEAN yang merupakan organisasi regional di Asia Tenggara dapat menyediakan mekanisme swadaya bagi negara-negara yang baru merdeka yang memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.

Meskipun memiliki kesamaan nasib antar negara pencetus ASEAN, organisasi ini berdiri pada saat-saat yang

mengkhawatirkan. Dalam waktu bersamaan, hampir setiap negara dari kelima negara anggota pertama ASEAN sedang saling berseteru. Malaysia dan Singapura yang mengalami ketegangan rasial baru saja berpisah. Indonesia yang telah mengalami kesengsaraan akibat kudeta berdarah komunis yang gagal, baru saja mengakhiri perang tidak resminya melawan Malaysia dan Singapura yang disebut dengan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Filipina mengaku memiliki hak atas sebagian wilayah di bagian timur Malaysia yang disebut Sabah. Sementara gerakan *proto-irredentist* yang terjadi di wilayah perbatasan menodai hubungan antara Malaysia dan Thailand, juga antara Indonesia dan Filipina.⁴⁹

William Douglas dalam *World Affair* 1956 menunjukkan sikap pesimisnya dengan mengatkan bahwa Asia Tenggara, “berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat memperhatikan. Kaya dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan menjadi incaran bagi mereka yang ingin membangun kemaharajaan Soviet, Asia Tenggara akan mengalami pergolakan dan kesusahan dalam waktu panjang.”⁵⁰ Charles Fisher bahkan menggambarkan kondisi Asia Tenggara saat itu sebagai “Balkan di Asia”, sambil meramalkan kemelut yang akan menimpa wilayah Asia Tenggara.⁵¹ Penggambaran Charles Fisher terhadap Asia Tenggara didasari pada beragamnya kondisi di wilayah ini, bahkan lebih beragam dibandingkan Balkan di Eropa. Wilayah Asia Tenggara ini cukup unik dikarenakan memiliki latar belakang agama, etnis, bahasa, budaya, dan pengalaman kolonial yang berbeda satu sama lainnya. Tentu akan sulit untuk menyatukan negara-negara ini dalam sebuah organisasi regional.

⁴⁹ Mahbubani, K., & Sng, J. (2017). Dalam *Keajaiban ASEAN - Penggerak Perdamaian* (hal. 5). Singapore: NUS Press.

⁵⁰ *Ibid* (Hal. 6)

⁵¹ *Ibid* (Hal. 7)

Gambar 3. 2 Penandatanganan Deklarasi Bangkok



Sumber: theglobal-review.com (diakses pada 20 Februari 2018)

Dalam kondisi tersebut, lima perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara yang juga menjadi pelopor dari ASEAN, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu

organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) telah resmi berdiri.⁵² Pada awalnya terbentuknya ASEAN, organisasi ini berfokus pada isu keamanan sebagai bentuk reaksi atas penyebaran pengaruh perang dingin di kawasan Asia Tenggara. Namun kini fokus ASEAN telah melebar ke masalah-masalah non-militer. Tujuan ASEAN saat ini ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya regional melalui semangat memperkuat komunitas ASEAN; meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional; meningkatkan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan administrasi; meningkatkan kerjasama di bidang industri, pertanian, dan perdagangan; meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara, menjalin hubungan baik dan kerjasama yang menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lainnya.⁵³

Meskipun awal berdirinya organisasi ini diprediksi secara pesimis, ASEAN terbukti telah bertahan hingga di usianya yang telah menginjak umur ke 50 tahun. Selama setengah abad tersebut, ASEAN berkembang dengan menjalankan berbagai agenda dalam bidang politik. Di antaranya *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration* (ZOPFAN) pada tahun 1971. Lalu disepakatinya *Treaty of Amity and*

⁵² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015, Maret 17). *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>

⁵³ Hennida, C. (2015). *Desain Rezim dan Organisasi Internasional*. Dalam *Rezim dan Organisasi Internasional* (hal. 43). Malang: Intrans Publishing.

Cooperation pada tahun 1976 yang berisikan prinsip-prinsip khusus Kerjasama di Asia Tenggara dan ketentuan-ketentuannya untuk penyelesaian sengketa regional dan untuk kerjasama regional demi mencapai perdamaian, persahabatan dan persahabatan di antara masyarakat Asia Tenggara. Prinsip-prinsip ini selanjutnya sering disebut dengan istilah '*ASEAN Way*'.

Kemajuan organisasi regional ini juga ditunjukkan dengan bertambahnya negara-negara yang bergabung, yaitu:⁵⁴

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Indonesia.
2. Vietman bergabung menjadi anggota ASEAN ke-7 pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, 29 Juli 1995
3. Laos dan Myanmar resmi bergabung menjadi anggota ke-8 dan ke-9 pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997
4. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN ke-10 dalam upacara penerimaan pada tanggal 30 April 1991 di Hanoi.

Dengan bergabungnya menjadi anggota baru ASEAN berarti negara-negara tersebut wajib untuk berkomitmen mengikuti seluruh perjanjian, traktat, dan deklarasi di ASEAN. Dimulai dengan Deklarasi Bangkok yang berisikan tujuan awal pembentukan organisasi ASEAN.

⁵⁴ *Ibid*

B. ASEAN Way dalam Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara

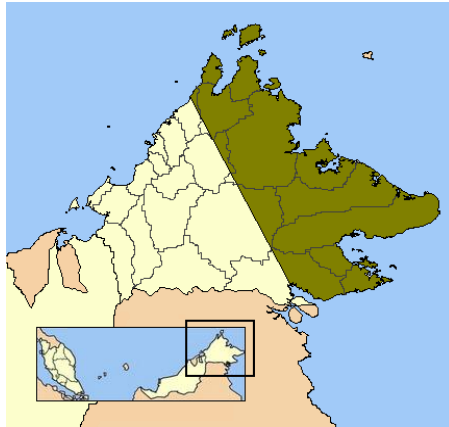
Selama 50 tahun berdiri, ASEAN telah dihadapkan oleh berbagai permasalahan baik permasalahan domestik suatu negara anggotanya maupun permasalahan yang melibatkan dua negara anggotanya atau lebih. Berikut ini adalah macam-macam permasalahan di regional Asia Tenggara dan bagaimana ASEAN menghadapinya dengan menggunakan prinsip-prinsip *ASEAN Way*.

1. Sengketa Sabah Antara Filipina dan Malaysia

Sejak awal terbentuk, ASEAN langsung dihadapkan oleh sengketa yang melibatkan dua negara anggotanya, yaitu Malaysia dan Filipina. Filipina mengklaim sebagian wilayah bagian timur dari Borneo Utara yang kini disebut dengan Sabah.

Pasca menjadi wilayah koloni Inggris, Sabah sempat kemerdekaan pada 31 August 1963 dan membentuk pemerintahan sendiri. Namun setelah diadakan diskusi antar perwakilan komunitas muslim, non-muslim, dan tionghoa, Sabah menyetujui untuk bergabung dengan Federasi Malaysia.

Gambar 3. 3 Peta Wilayah Filipina di Sabah



Sumber: Wikiwand.com (diakses pada 1 Maret 2018)

Sengketa ini diakibatkan oleh perbedaan status mengenai wilayah Borneo Utara antara Filipina dan Malaysia. Dalam perjanjian antara Kesultanan Sulu dan Sindikat Pedagang Inggris tertulis:

*sudah kuredhai **pajakan** dengan keredhaan dan kesukaan kita sendiri kepada tuan Gustavus Baron von Overbeck yang tinggal dalam negeri Hong Kong dan kepada Alfred Dent Esquire yang tinggal dalam negeri London... sampai selama-lamanya sekalian perintah dan kuasa yang kita punya yang takluk kepada kita di tanah besar Pulau Borneo dari Sungai Pandasan di sebelah barat sampai sepanjang semua tanah di pantai sebelah timur sejauh Sungai Sibuku di sebelah selatan⁵⁵*

⁵⁵ Aziz, H. (2016). Perjanjian Sulu-Overbeck 1878. *Tuntutan Kesultanan Sulu Terhadap Sabah*, 284.

Dari perjanjian ini terdapat perbedaan tafsiran antara Malaysia dan Filipina. Malaysia mengklaim bahwa kata *pajakan* dapat diartikan sebagai “hibah”. Sementara kata *pajakan* sendiri diartikan sebagai “sewa” oleh Filipina. Akibatnya terjadi beberapa kali perselisihan yang diakibatkan oleh sengketa wilayah ini.

Isu klaim Filipina atas wilayah Sabah telah muncul sejak tahun 1961, namun kemudian kembali diperbincangkan ketika Ferdinand Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina. Isu ini memanas kembali ketika Maret 1968 tersebar berita dari surat kabar Manila bahwa Filipina melakukan latihan militer rahasia di Pulau Corregidor. Pasca pemberitaan ini, hubungan antar kedua negara tersebut terus memburuk hingga sempat terjadi pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1968.

Awalnya upaya penyelesaian sengketa ini muncul melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, akhirnya ASEAN mampu meredam krisis ini. Dalam forum *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* (AMM) ke-2 yang diselenggarakan pada Agustus 1968 negara-negara anggota ASEAN mengajak kedua negara yaitu Malaysia dan Filipina untuk mengurangi tensi krisis yang tengah terjadi.

Malaysia sempat menanggapi negatif pertemuan ASEAN dengan pembahasan isu klaim Sabah. Malaysia mengancam akan memboikot pertemuan-pertemuan ASEAN apabila terus membahas isu ini. Pada 3 Januari 1969 Perdana Menteri Malaysia Tun Razak juga menyampaikan bahwa Malaysia tidak akan menarik diri dari keanggotaan ASEAN dan bertekad untuk menegakkan Deklarasi Bangkok tahun 1967.

Sepanjang tahun 1969 ASEAN terus melakukan serangkaian pertemuan yang akhirnya dapat melunakkan Filipina agar tidak lagi mempersoalkan isu klaim Sabah dalam

pertemuan ASEAN.⁵⁶ Alhasil, kedua negara dapat disatukan kembali dalam ASEAN Committee Meeting pada bulan Mei 1969. Kedua negara bahkan kembali menyambung hubungan diplomatik setelah disepakainya persetujuan antara Malaysia dan Filipina pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* di bulan Desember 1969.

Dalam kasus ini ASEAN berhasil menurunkan ketegangan antara Malaysia dan Filipina dengan cara yang damai. Meskipun cara ini bukan merupakan solusi permanen namun setidaknya tidak terjadi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik ini.

2. Sengketa Kamboja dan Thailand atas Kuil Preah Vihear

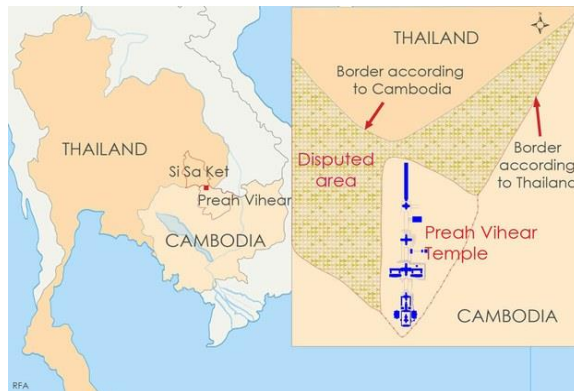
Sengketa ini dimulai saat Kamboja merdeka tahun 1953. Klaim Kamboja atas Kuil Preah Vihear memicu ketegangan dengan Thailand. Thailand yang tidak setuju mengenai keputusan Kamboja tersebut merespons dengan mengirimkan pasukan tentaranya untuk mengamankan Kuil tersebut. Kamboja yang baru saja merdeka sehingga masih lemah dalam bidang militer dan ekonomi tidak dapat berbuat banyak atas tindakan yang dilakukan Thailand tersebut. Kamboja sempat berupaya dengan mengirimkan memorandum kepada Pemerintah Thailand, namun upaya tersebut tidak direspon oleh Pemerintahan Thailand.

Sengketa atas Kuil Preah Vihear akhirnya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada Juli 1962, dengan memutuskan bahwa kepemilikan Kuil Preah Vihear jatuh kepada Kamboja. Sementara Thailand diwajibkan untuk menarik pasukan tentaranya dari wilayah sekitar kuil.

⁵⁶ Cipto, B, Op.cit., hal 40.

Isu sengketa ini kembali memanas ketika pada bulan Januari 2008 Kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia ke UNESCO tanpa berembuk terlebih dahulu dengan Thailand.⁵⁷ Walaupun akhirnya keputusan tersebut disetujui oleh Pemerintah Thailand, sikap Pemerintah Kamboja tersebut memicu protes dari masyarakat Thailand. Pada 15 Juli 2008, tiga warga berkebangsaan Thailand ditangkap otoritas Kamboja karena berusaha untuk mendirikan bendera Thailand di dekat kuil Preah Vihear. Beberapa hari setelah kejadian tersebut kedua negara menambah jumlah pasukan di sekitar wilayah perbatasan.

Gambar 3. 4 Peta Wilayah Sengketa Antara Kamboja Myanmar



Sumber: rfa.org (diakses pada 4 Maret 2018)

Hingga di bulan Oktober 2008, terjadi baku tembak antara petugas penjaga perbatasan kedua negara. Baku tembak tersebut mengakibatkan dua tentara Kamboja dan satu tentara

⁵⁷ Mahbubani, K., & Sng, J, Op.cit., hal. 309.

Thailand tewas. Baku tembak terjadi lagi pada Februari 2011, kali ini mengakibatkan korban jiwa tentara dan warga sipil dari kedua negara.

Di tengah isu sengketa yang sedang memanas, ASEAN mencoba untuk berperan sebagai *peace-making*. Dalam pertemuan *ASEAN Foreign Ministers* 20 Juli 2008, ASEAN mendesak agar kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah tersebut secara damai.⁵⁸ Demikian juga ketika terjadi insiden baku tembak pada Februari 2011. Satu hari setelah kejadian tersebut Indonesia sebagai Ketua KTT ASEAN saat itu segera melakukan tindakan *peace-making*. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa melakukan “shuttle diplomacy” menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersamaan dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun pergi menuju New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan.⁵⁹ Inisiatif dari Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia akan menjadi negara *observer* untuk memantau wilayah perbatasan yang disengketakan Kamboja dan Thailand. Menurut Marty Natalegawa, Tim *observer* dari Indonesia bukanlah pasukan *peacekeeping*. Walaupun berisikan militer dan sipil, tim

⁵⁸ Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2008, July 21). *Transcript of Door-stop Interview by Minister for Foreign Affairs George Yeo*. Diambil kembali dari www1.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2008/07/Transcript-of-Doorstop-Interview-by-Minister-for-Foreign-Affairs-George-Yeo-on-the-Temple-of-Preah-V

⁵⁹ Kompas.com. (2011, Februari 22). *Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>

observer tidak akan dipersenjatai.⁶⁰ Indonesia juga mendorong dilakukannya pembicaraan antara kedua negara yang bersengketa untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama ini.

Keputusan tersebut cukup berhasil meredakan ketegangan antara kedua negara, walaupun sempat terjadi dua insiden di tahun 2011. ASEAN berhasil menjaga perdamaian kedua negara hingga keluarnya keputusan Mahkamah Internasional pada November 2013 yang memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas areal tanah beserta Kuil Preah Vihear

3. Intervensi ASEAN pada Krisis Topan Nargis di Myanmar

Pada tahun 2008 bencana alam melanda negara Myanmar. Sebuah topan yang dinamai Topan Nargis mengakibatkan kerusakan parah di sebagian besar wilayah Myanmar. Bencana ini merupakan bencana alam terparah dalam sejarah Myanmar dengan laporan sekitar 200.000 jiwa tewas atau hilang. Di samping hilangnya ratusan ribu jiwa, Topan Nargis juga menyebabkan lumpuhnya sektor pertanian dan perikanan, kerugian harta benda mencapai sekitar 4,1 miliar dollar AS dan hilangnya mata pencaharian lebih dari 2,4 juta jiwa. Dalam keadaan genting ini, Pemerintah Myanmar tidak dapat menyelesaikan masalah ini seorangan. Myanmar membutuhkan bantuan dari luar negeri, meskipun Myanmar pada saat itu tengah diperintah oleh junta militer yang dikenal menutup diri dari dunia luar.

Menanggapi bencana ini, masyarakat internasional termasuk ASEAN mencoba untuk menawarkan bantuan

⁶⁰ BBC. (2011, Februari 22). *Thailand and Cambodia to accept monitors for border row*. Diambil kembali dari BBC News: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12534980>

kemanusiaan kepada pemerintah Myanmar. Presiden Amerika Serikat George Bush bahkan bersedia memberikan bantuan senilai 3,25 juta dollar AS dan bersedia memberikan lebih banyak lagi apabila Junta Militer yang berkuasa mengizinkan.⁶¹

Gambar 3. 5 Armada Angkatan Laut AS di Laut Andaman



Sumber: cbsnews.com (diakses pada 10 Maret 2018)

Militer Amerika Serikat juga memerintahkan armada Angkatan Lautnya USS Essex group untuk membawa bantuan darurat ke wilayah Myanmar. Armada Angkatan Laut USS Essex group yang terdiri dari empat kapal, 22 helikopter, dan 5.000 personel militer Amerika Serikat telah berada di perairan internasional lebih dari tiga minggu menunggu izin Myanmar untuk mengirimkan bantuan. Militer AS setidaknya telah 15 kali berupaya meyakinkan pemerintah Junta Militer agar

⁶¹ ReliefWeb. (2008, May 06). *U.S. provides \$3.25 million to aid Burma cyclone victims*. Diambil kembali dari ReliefWeb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/us-provides-325-million-aid-burma-cyclone-victims>

menerima kapal, helikopter, dan pesawat AS untuk memberikan bantuan tambahan kepada rakyat Myanmar.⁶²

Permintaan-permintaan tersebut ditolak pemerintah Myanmar yang menaruh curiga terhadap bantuan yang berasal dari luar negeri. Pemerintah Myanmar hanya menerima bantuan-bantuan dari luar negeri dengan jumlah yang kecil dan menolak menerima pasukan sukarelawan untuk masuk dan membantu rakyat Myanmar. Padahal kondisi Myanmar saat itu sangat kekurangan jumlah dokter dan sukarelawan untuk membantu membersihkan puing-puing sisa terpaan badai Nargis.

Respon penolakan penerimaan bantuan ini dibahas pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* tanggal 19 Mei 2008 di Singapura. Diskusi menjadi tegang akibat sikap pemerintah Myanmar yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri. Desakan datang dari menteri-menteri luar negeri ASEAN terhadap Menteri Luar Negeri Myanmar Nyan Win agar Myanmar menarik penolakannya. George Yeo selaku tuan rumah angkat bicara dengan menyarankan Nyan Win untuk membicarakan diskusi ini kepada pemerintah pusat. Selang setelah makan siang, pemerintah Myanmar melalui Nyan Win menyatakan setuju untuk dibukanya pintu bagi bantuan luar negeri.⁶³

Selain disetujuinya bantuan asing untuk masuk ke negara Myanmar, persetujuan ini juga menjadi awal terbentuknya *The Tripartite Core Group* (TCG). TCG merupakan mekanisme kerja yang menggabungkan ASEAN, Pemerintah Myanmar, dan

⁶² NBC News. (2008, Juni 5). *Aid-laden U.S. Ships Abort Cyclone Mission*. Diambil kembali dari NBC News: http://www.nbcnews.com/id/24958259/ns/world_news-asia_pacific/t/aid-laden-us-ships-abort-cyclone-mission/#.WrZCCnpua00

⁶³ Mahbubani & Sng. (2017) Op.cit., (hal. 308)

Perserikatan Bangsa-Bangsa. TCG memiliki mandat resmi untuk mengkoordinasikan sumber daya, memfasilitasi pengerjaan termasuk akses untuk pekerja kemanusiaan, dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pencapaian. Faktor penting lainnya dari TCG ialah berfungsi sebagai forum bertukar informasi, apakah ada permasalahan dari daerah yang dapat ditangani pihak berwenang atau menginformasikan perkembangan dalam upaya pemberian bantuan kepada pihak *stakeholder*.⁶⁴ TCG berjalan dengan lancar hingga mandatnya berakhir pada 31 Juli 2010.

Dibukanya pintu bantuan baik berupa barang maupun tenaga kemanusiaan dari luar negeri ini menyelamatkan ratusan tibu nyawa di Myanmar. Keputusan ini juga membuat penilaian masyarakat internasional terhadap pemerintahan Myanmar yang dikenal tertutup menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ASEAN harus tetap berperan penting dalam permasalahan di regionalnya.

⁶⁴ ASEAN. (2010). Op.cit., (hal. 48)